

## ABSTRAK

Tesis ini ditulis untuk mengetahui konsep perusahaan cangkang dan tujuan pembentukannya serta upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk dapat mencegah penyelewengan pembentukan perusahaan cangkang tersebut bagi perusahaan PMA di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk mencegah pembentukan anak perusahaan (*subsidiary*) dalam bentuk perusahaan cangkang. Peraturan perundang-undangan dalam bidang perseroan terbatas, pasar modal, perbankan, perpajakan, pencucian uang, dan penanaman modal sudah memberikan mekanisme agar setiap pendirian PMA melalui pembentukan Perseroan Terbatas dilakukan melalui pendaftaran, dan pencatatan nama pemegang saham. Demikian juga transaksi perbankan mensyaratkan penyebutan identitas pemilik dana. Peraturan perpajakan secara tegas melarang *beneficiary owner* untuk mendapatkan fasilitas pembebasan perpajakan. Secara umum regulasi Indonesia mengimplementasikan 2 (dua) strategi dalam membatasi *beneficiary owner*, yaitu melalui (a) sistem keterbukaan langsung di muka (*up-front disclosure system*); dan (b) kewajiban kepada *corporate service provider*.

**Keyword** : perusahaan cangkang, *beneficiary owner*, penanaman modal asing.